

## SISTEM PENDATAAN UMKM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENINGKATAN AKSES MODAL DAN PERLUASAN PASAR

Siti Marfuah Bako<sup>1</sup>, Melisa<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Haririe Nasution<sup>3</sup>, Nurbaiti<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[sitimarfuahbako04@gmail.com](mailto:sitimarfuahbako04@gmail.com), <sup>2</sup>[imell2309@gmail.com](mailto:imell2309@gmail.com), <sup>3</sup>[mfaisalharirienst@gmail.com](mailto:mfaisalharirienst@gmail.com),

<sup>4</sup>[nurbaiti@uinsu.ac.id](mailto:nurbaiti@uinsu.ac.id)

### Abstract

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy but continue to face challenges in accessing financing and expanding markets. One of the root causes is the lack of an optimal, accurate, and integrated data system. This study aims to analyze how an effective MSME data system can enhance access to financing and facilitate market expansion. The research method used is descriptive qualitative, employing a literature review based on recent scientific sources. The results show that a well-structured data system including information on business legality, profiles, financial records, and sales activities can assist financial institutions in assessing creditworthiness and serve as a foundation for policy-making in aid distribution and digital promotion. With a nationally integrated MSME database, MSME actors have greater opportunities to reach broader markets through digital platforms and government programs.*

**Keywords:** MSMEs, data system, access to capital, market expansion, digitalization

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala dalam akses permodalan dan perluasan pasar. Salah satu akar permasalahannya adalah belum optimalnya sistem pendataan UMKM yang akurat dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pendataan UMKM yang efektif dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan serta memperluas jangkauan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang merujuk pada sumber ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendataan yang baik mencakup informasi legalitas, profil usaha, data keuangan, dan aktivitas penjualan dapat mempermudah lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan distribusi bantuan serta promosi digital. Dengan adanya database UMKM yang terintegrasi secara nasional, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan program pemerintah.

**Kata Kunci:** UMKM, sistem pendataan, akses modal, perluasan pasar, digitalisasi

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Data terbaru menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian. Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus alat untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran dan pedesaan. Namun, meskipun perannya sangat strategis, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal akses modal dan penetrasi pasar yang masih terbatas. (Oktaviani & Sunaryo et al., 2022).

Salah satu kendala utama yang dialami UMKM adalah kurangnya sistem pendataan yang memadai dan terintegrasi, sehingga banyak pelaku usaha kecil yang belum teridentifikasi dengan baik dalam database resmi pemerintah dan lembaga keuangan. Pendataan yang tidak lengkap dan akurat menyebabkan UMKM sulit mendapatkan akses ke berbagai program pembiayaan dan dukungan pemerintah yang memerlukan validasi data usaha. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan dan menghambat percepatan digitalisasi UMKM sebagai upaya peningkatan daya saing di era ekonomi digital. (Siregar et al., 2024)

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar untuk memperbaiki sistem pendataan UMKM melalui aplikasi dan platform digital yang mampu mengintegrasikan data usaha secara real time dan transparan. Sistem pendataan digital dapat menyimpan informasi lengkap seperti legalitas usaha, kapasitas produksi, omzet, dan profil keuangan yang memudahkan pelaku usaha mengakses fasilitas permodalan di perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan akses lebih mudah ke pasar digital dan marketplace yang sedang berkembang pesat saat ini. (Lestari & Maulana et al., 2022)

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta lembaga terkait, telah menginisiasi berbagai program digitalisasi UMKM yang bertujuan meningkatkan kualitas data dan memperkuat ekosistem UMKM nasional. Salah satu contoh program tersebut adalah Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dirancang untuk memetakan UMKM secara lebih sistematis dan membantu lembaga keuangan dalam melakukan analisis risiko pembiayaan. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam mendapatkan modal yang lebih mudah dan murah, sekaligus memperluas jangkauan pasar mereka melalui kanal distribusi digital. (Anwar & Ramadhan et al., 2023).

Namun demikian, implementasi sistem pendataan UMKM tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Selain itu, kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem digital juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi pendataan ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang tepat dalam pengembangan sistem pendataan UMKM yang efektif. (Fitriani & Wahyuni et al., 2023)

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme, tantangan, dan peluang sistem pendataan UMKM, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dalam mengoptimalkan potensi digitalisasi dan integrasi data untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. (Siregar et al., 2024).

## LANDASAN TEORI

### 1. Peran Strategis UMKM dalam Perekonomian Nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga memainkan peran sentral dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan, khususnya di daerah tertinggal.

Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi digital, serta lemahnya integrasi data masih menghambat optimalisasi peran UMKM dalam perekonomian nasional (Fitriani & Wahyuni et al., 2023)

### 2. Konsep Sistem Pendataan UMKM

Sistem pendataan UMKM merupakan kerangka kerja digital yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan informasi usaha secara real-time dan terintegrasi. Data ini meliputi legalitas, profil usaha, kapasitas produksi, omzet, serta status kepatuhan terhadap peraturan. Menurut (Laudon & Laudon et al., 2020), sistem informasi manajemen yang efisien harus memenuhi kriteria integrasi, akurasi, aksesibilitas, dan keamanan data.

Dalam konteks UMKM, sistem pendataan diperlukan untuk menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy) yang dapat meningkatkan efektivitas program bantuan, pembiayaan, dan pelatihan usaha.

### 3. Akses Permodalan dalam Pengembangan UMKM

Konsep financial inclusion menekankan bahwa ketersediaan akses ke layanan keuangan formal secara luas merupakan kunci dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam penelitian (Ghosh & Vinod et al., 2020), dijelaskan bahwa asimetri informasi menjadi penghalang utama UMKM dalam mengakses kredit. Sistem pendataan digital terbukti dapat menurunkan risiko informasi yang timpang dengan menyediakan data keuangan yang kredibel kepada lembaga keuangan.

(Lestari & Susanto et al., 2021) menambahkan bahwa transparansi data melalui sistem digital membantu lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit (creditworthiness) pelaku UMKM secara lebih objektif dan akuntabel.

### 4. Perluasan Pasar melalui Digitalisasi dan Basis Data Terintegrasi

Digitalisasi membuka peluang signifikan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform e-commerce, media sosial, dan kanal digital lainnya. Namun, keterlibatan UMKM dalam ekosistem digital sangat bergantung pada keberadaan data usaha yang terdokumentasi secara resmi dan terverifikasi. Menurut (Maulana & Hasanah et al., 2023), sistem pendataan UMKM berbasis digital memperbesar peluang produk lokal untuk dikurasi, dipromosikan, dan dijangkau oleh konsumen nasional maupun global.

Pemerintah juga menggunakan data terintegrasi dalam memilih UMKM peserta program pameran digital, platform promosi daerah, serta bantuan logistik dan distribusi digital (Ramadhani et al., 2023).

### 5. Digitalisasi Data dan Teknologi Informasi

Transformasi digital dalam pendataan UMKM mencakup penggunaan teknologi seperti cloud computing, big data, hingga kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan sistem yang efisien, transparan, dan tahan terhadap manipulasi data. (Lestari & Maulana et al., 2022) menyatakan bahwa penerapan digitalisasi dalam sistem pendataan UMKM berkontribusi besar terhadap efisiensi operasional dan kemudahan pengambilan keputusan.

Di Indonesia, program seperti Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), OSS (Online Single Submission), dan Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM telah menjadi contoh konkret integrasi teknologi informasi dalam pendataan UMKM (Kemenkop UKM, 2023).

## 6. Tantangan Implementasi Sistem Pendataan UMKM

Meskipun potensi sistem pendataan sangat besar, pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan. (Fitriani & Wahyuni et al., 2023) mengidentifikasi kendala utama seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya infrastruktur teknologi di daerah tertinggal, serta minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang enggan terlibat karena kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi mereka.

Sebagai solusi, diperlukan pendekatan partisipatif dan dukungan regulatif yang mendorong kolaborasi antar lembaga serta pemberian insentif untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem digital nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran sistem pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan akses terhadap permodalan dan memperluas jangkauan pasar di era digital.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber ilmiah yang relevan dan terkini, baik dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta dokumen penelitian dari lembaga terpercaya yang terbit dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Fokus kajian diarahkan pada isu-isu strategis seperti efektivitas sistem pendataan UMKM, digitalisasi informasi usaha, akses pembiayaan, serta penetrasi pasar digital oleh pelaku UMKM.

Prosedur kajian melibatkan tahapan berikut:

1. Identifikasi dan seleksi literatur berdasarkan kata kunci: UMKM, sistem pendataan, akses modal, perluasan pasar, digitalisasi.
2. Analisis isi (content analysis) terhadap substansi literatur, terutama mengenai hubungan antara sistem pendataan dan dua variabel utama penelitian: akses permodalan dan perluasan pasar.
3. Sintesis tematik, yakni mengelompokkan temuan-temuan literatur ke dalam tema-tema utama untuk kemudian dianalisis secara kritis dan komparatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memetakan pengetahuan yang telah ada, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan konseptual (research gap) dan peluang pengembangan sistem pendataan UMKM yang terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan ekosistem UMKM berbasis data yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau observasi, sehingga seluruh kesimpulan dan pembahasan disusun berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber literatur akademik yang relevan dan mutakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pentingnya Sistem Pendataan dalam Pemetaan UMKM

Sistem pendataan UMKM yang terstruktur secara digital memainkan peran sentral dalam pemetaan kondisi faktual pelaku usaha. Informasi seperti legalitas usaha, jenis produk, lokasi geografis, dan data transaksi sangat dibutuhkan untuk analisis spasial dan sektoral. Menurut (Haryanto et al., 2022), sistem berbasis cloud memungkinkan penyimpanan dan pembaruan data secara real-time, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan UMKM di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, data terpusat ini dapat mendukung klasifikasi UMKM berdasarkan potensi dan skala usaha, yang penting untuk alokasi subsidi dan pendampingan. Tanpa sistem yang akurat, distribusi intervensi pemerintah akan tidak tepat sasaran dan berisiko menimbulkan ketimpangan.

## 2. Sistem Pendataan sebagai Solusi Permasalahan Asimetri Informasi

Salah satu penyebab utama sulitnya akses permodalan UMKM adalah minimnya dokumentasi usaha yang dapat diverifikasi oleh lembaga keuangan. Sistem pendataan digital menjadi instrumen untuk menurunkan tingkat asimetri informasi antara UMKM dan lembaga pembiayaan. (Lestari & Susanto et al., 2021) menegaskan bahwa data seperti histori penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lama usaha dapat menjadi pengganti laporan keuangan konvensional yang belum dimiliki sebagian besar UMKM. Dengan pendekatan ini, lembaga pembiayaan dapat menyusun skema penilaian kelayakan kredit yang lebih inklusif. Digitalisasi data juga memudahkan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem fintech dan layanan keuangan berbasis teknologi.

## 3. Pendataan Terintegrasi dan Perluasan Akses Pasar Digital

UMKM yang terdokumentasi secara digital memiliki peluang lebih besar untuk memasarkan produk melalui e-commerce, katalog digital pemerintah, dan marketplace swasta. (Maulana & Hasanah et al., 2023) menunjukkan bahwa pendataan yang terintegrasi dengan sistem kurasi produk lokal membantu UMKM menembus pasar regional bahkan internasional. Data yang lengkap memudahkan pemerintah dan platform digital dalam melakukan kurasi dan promosi. Produk-produk unggulan daerah yang telah terverifikasi melalui sistem pendataan lebih mudah ditampilkan dalam program digitalisasi seperti “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)”. Dengan demikian, sistem pendataan berfungsi tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam transformasi pasar UMKM.

## 4. Kendala Literasi Digital dan Kepercayaan terhadap Sistem

Meski sistem digitalisasi pendataan menjanjikan banyak manfaat, pelaksanaannya masih menemui tantangan besar, khususnya pada aspek literasi digital pelaku UMKM. (Fitriani & Wahyuni et al., 2023) mencatat bahwa sebagian besar UMKM di daerah belum terbiasa menggunakan teknologi untuk mencatat transaksi, membuat profil usaha, atau mendaftarkan izin secara daring. Selain itu, keraguan terhadap keamanan data juga masih tinggi. Banyak pelaku usaha khawatir informasi yang mereka serahkan akan digunakan untuk keperluan pajak atau dikomersialkan. Oleh karena itu, edukasi digital dan jaminan perlindungan data pribadi menjadi prasyarat penting agar sistem pendataan dapat diterima secara luas oleh pelaku UMKM.

## 5. Kebutuhan Interoperabilitas antar Sistem Pendataan

Saat ini, sistem pendataan UMKM di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian dan platform digital swasta yang belum saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan duplikasi data dan menyulitkan validasi lintas sektor. Hasil telaah studi oleh (Kementerian Koperasi dan UKM 2023) menekankan perlunya pembangunan infrastruktur interoperabilitas digital yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga secara otomatis. Standarisasi format data dan penggunaan basis identitas digital tunggal seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi kunci keberhasilan integrasi. Dengan sistem yang terkoordinasi, pemangku kepentingan dapat mengakses data UMKM secara efisien dan tepat waktu, serta menghindari pemborosan anggaran pada program yang tumpang tindih.

## 6. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Digitalisasi Pendataan

Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam memperkuat sistem pendataan UMKM secara nasional. Program Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan Sistem Data Tunggal KUMKM merupakan contoh upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan data pelaku usaha secara sistemik. (Anwar & Ramadhan et al., 2023) menekankan bahwa keberhasilan program semacam ini sangat ditentukan oleh sinergi antara pusat dan daerah, serta kemudahan akses bagi pelaku usaha. Pemerintah juga perlu menyediakan insentif seperti kemudahan akses pembiayaan atau promosi untuk mendorong partisipasi UMKM dalam pendataan digital.

Tanpa regulasi yang jelas dan tegas, sistem pendataan akan berjalan secara parsial dan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi pembuat kebijakan maupun pelaku usaha.

## **7. Pendataan UMKM sebagai Fondasi Inklusi Keuangan Nasional**

Menurut (Ghosh & Vinod et al., 2020), kehadiran sistem pendataan yang kuat merupakan prasyarat penting dalam membangun inklusi keuangan yang berkeadilan. UMKM yang tidak terdokumentasi cenderung dinilai berisiko tinggi oleh lembaga keuangan formal karena tidak ada data yang dapat diverifikasi. Dengan sistem data yang memuat informasi omzet, lokasi, dan histori usaha, pelaku UMKM dapat memperoleh akses ke produk pembiayaan mikro, termasuk pinjaman tanpa agunan, kredit usaha rakyat (KUR), dan layanan fintech lending. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan ke level 90% pada tahun 2025. Pendataan yang baik dapat menjembatani kesenjangan antara sektor usaha mikro dan lembaga pembiayaan formal.

## **8. Pemerataan Akses Pasar melalui Digitalisasi Pendataan**

Salah satu fungsi strategis sistem pendataan digital adalah memberikan peluang setara bagi UMKM di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas. Dalam studi (Ramadhani et al., 2023), disebutkan bahwa keterhubungan antara data usaha dan platform logistik digital memungkinkan UMKM dari daerah terluar mengakses konsumen nasional. Pendataan juga mendukung sistem klasterisasi industri lokal, sehingga memudahkan promosi produk unggulan daerah. Pendekatan ini secara tidak langsung juga mendorong penguatan ekonomi daerah berbasis keunggulan lokal. Tanpa sistem digital yang inklusif, UMKM di desa-desa akan terus tertinggal karena minimnya eksposur terhadap peluang pemasaran berbasis teknologi.

## **9. Pendataan sebagai Alat Intelijen Bisnis untuk UMKM**

Data yang dikumpulkan dari kegiatan usaha sehari-hari dapat diolah menjadi informasi strategis yang membantu pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan bisnis. Melalui sistem pendataan yang terdigitalisasi, pelaku usaha dapat melihat tren penjualan, segmentasi pasar, dan efektivitas promosi. (Lestari & Maulana et al., 2022) menyebutkan bahwa pelaku UMKM yang mengintegrasikan sistem kasir digital dan laporan penjualan online mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30%. Pendataan semacam ini juga penting untuk menyusun strategi penambahan produk, perubahan harga, serta perencanaan stok. Oleh karena itu, sistem pendataan tidak hanya berdampak pada pihak eksternal, tetapi juga memperkuat manajemen internal UMKM.

## **10. Kolaborasi Multipihak sebagai Kunci Penguatan Ekosistem Data**

Penguatan sistem pendataan UMKM tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas institusi. (Siregar et al., 2024) menyoroti bahwa fragmentasi sistem data antara kementerian, dinas daerah, asosiasi, dan platform swasta menjadi hambatan serius bagi sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, perlu dibentuk kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan semua aktor, termasuk perguruan tinggi dan lembaga riset. Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator utama dalam integrasi data, sementara sektor swasta mendukung dengan teknologi dan pendanaan. Hanya dengan sinergi multipihak, sistem pendataan UMKM dapat menjadi pilar transformasi ekonomi nasional yang berbasis data dan teknologi.

## **Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendataan UMKM yang akurat, terstruktur, dan terintegrasi secara nasional memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya dalam dua aspek utama: peningkatan akses terhadap modal dan perluasan jangkauan pasar. Pendataan yang komprehensif memungkinkan pelaku UMKM memperoleh validasi dari lembaga keuangan dan pemerintah sehingga memperbesar peluang memperoleh pembiayaan formal. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai alat intelijen bisnis yang membantu pelaku UMKM

memahami pasar, merespons tren permintaan, dan memanfaatkan platform digital untuk ekspansi usaha. Temuan menunjukkan bahwa dengan digitalisasi pendataan, UMKM menjadi lebih kredibel di mata lembaga keuangan, lebih mudah diakses oleh konsumen digital, serta lebih siap dalam menghadapi era ekonomi berbasis data. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya koordinasi lintas lembaga masih menjadi penghambat utama yang harus diatasi secara strategis.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta secara aktif memperkuat sistem pendataan UMKM melalui pengembangan platform digital yang mudah diakses dan terintegrasi secara nasional. Penguatan sistem ini perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah yang masih terbatas akses teknologinya. Program pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas perlu diperluas guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya data usaha yang akurat dan terdokumentasi dalam mendukung akses modal dan perluasan pasar. Pemerintah juga diharapkan menyusun regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi UMKM guna membangun kepercayaan terhadap sistem digital. Selain itu, pemberian insentif berupa prioritas pembiayaan, pelatihan, dan promosi bagi UMKM yang telah terdata secara digital dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha. Sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan mitra swasta juga perlu diperkuat agar sistem pendataan UMKM tidak berjalan secara terfragmentasi, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem yang mampu menjadi landasan kebijakan dan inovasi di sektor UMKM secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Ananda, F., & Darmawan, A. (2022). Digitalisasi UMKM dan akses pembiayaan: Studi empiris pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1).
- Anwar, H., & Ramadhan, I. (2023). Peran sistem informasi kredit program dalam memperluas akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah*, 11(1), 56-69.
- Fitriani, E., & Wahyuni, S. (2023). Strategi penguatan digitalisasi UMKM di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Digital*, 5(2), 45-58.
- Ghosh, S., & Vinod, H. D. (2020). Credit scoring models for microfinance: Evaluating the impact of information asymmetry. *Journal of Financial Services Research*, 57(1), 65-84.
- Haryanto, E., Sari, M., & Prasetyo, T. (2022). Digitalisasi pendataan UMKM berbasis cloud. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 10-21.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan Tahunan Gernas BBI 2022*. Deputi Bidang Pemasaran, Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Integrasi Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM*. Kemenkop UKM RI.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson Education.
- Lestari, A. D., & Susanto, B. (2021). Inklusivitas akses permodalan UMKM melalui pendataan digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 55-67.
- Lestari, D., & Maulana, R. (2022). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas data UMKM. *Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis*, 6(2), 90-101.
- Maulana, R., & Hasanah, N. (2023). Transformasi digital UMKM dan perluasan pasar melalui sistem kurasi produk lokal. *Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 5(2), 112-125.
- Ramadhani, S. (2023). Peran sistem pendataan dalam memperluas jangkauan pasar digital UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 5(1), 33-48.
- Siregar, A., Yuliani, N., & Arifin, M. (2024). Evaluasi efektivitas sistem data UMKM dalam program bantuan sosial pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 21-35.